

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keterkaitan erat Asas Praduga tidak bersalah dengan Hak Asasi Manusia sebagai bagian integral dari konsep negara hukum, hal ini berimplikasi pada pengakuan terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga negara. Sebagai bentuk jaminannya berlakulah asas praduga tak bersalah yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Perlindungan hak asasi manusia, diwujudkan dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang mana pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah menjadikan tersangka atau terdakwa agar ditempatkan kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki keluruhan harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum sehingga hak asasi tersebut tidak dilanggar.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah terdapat dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Salah satunya Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa setiap individu yang dituduh, ditahan, didakwa, atau dihadirkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai dijatuhi putusan yang menyatakan kesalahannya oleh pengadilan.

B. SARAN

1. Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum dan berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) maka dari itu asas ini harus diterapkan di setiap proses peradilan agar kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati serta melindungi hak hak tersangka sehingga tidak terjadi Tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dapat mendukung dan memperkuat penerapan asas praduga tidak bersalah, oleh krena itu perlu diperkuatnya kerangka hukum dan konstitusi yang menjamin asas praduga tidak bersalah sebagai hak asasi yang harus dilindungi serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asas praduga tidak bersalah sebagai bagian dari upaya penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pendidikan, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.